



DAMPAK SOSIAL MEDIA BAGI PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA LEBIH BAIK

Sulistiyowati, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta

Email : sulistiyowatiadvokat@gmail.com

Muhammad Hafiduddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi, Jakarta

Email : elhavidz@gmail.com

Agnes Melania Carnely Kahe, Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta

Email : agnsmlnie02@gmail.com

Abstract

Social Media has become an essential platform for public participation in the life of the nation and state. This article discusses the positive and negative impacts of social media on public participation and how social media can be used to improve the quality of life of the nation and state. Its positive impact is increasing access to information and political participation. Social Media can mobilize the masses and raise awareness about important issues. Additionally, it increases Government Accountability: Social Media can be used to keep tabs on government performance and hold it accountable. The negative impact of social media can be used to spread misinformation and hoaxes, which can trigger polarization and social conflict. Social Media can be a platform for cyberbullying and hate speech, which can negatively impact the mental health of individuals and communities. Excessive use of social media can lead to dependence and directly affect social interactions. Social media has great potential to increase public participation and the quality of life of the nation and state, as well as for economic improvement. However, it is crucial to be aware of the negative impact of social media and use it responsibly. It is also crucial for the government and civil society to work together to create a conducive and positive social media environment. This study is a normative and qualitative research study.

Keywords: social media, public participation, positive impact, negative impact



Media sosial telah menjadi platform penting bagi partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini membahas dampak positif dan negatif media sosial terhadap partisipasi publik, serta bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak Positifnya meningkatkan akses informasi dan partisipasi politik. Media sosial dapat digunakan untuk memobilisasi massa dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting. Selain itu meningkatkan akuntabilitas pemerintah: Media sosial dapat digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban. Dampak Negatifnya media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan hoaks, yang dapat memicu polarisasi dan konflik sosial. Media sosial dapat menjadi platform bagi cyberbullying dan ujaran kebencian, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu dan komunitas. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan memengaruhi interaksi sosial secara langsung. Media sosial memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan partisipasi publik dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, penting untuk menyadari dampak negatif media sosial dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Penting juga bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan media sosial yang kondusif dan positif.

Kata kunci : media sosial, partisipasi publik, dampak positif, dampak negatif



PENDAHULUAN

Media sosial membuka gerbang informasi dan partisipasi politik bagi rakyat dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Platform ini memungkinkan individu untuk: Mengakses informasi dengan mudah berita, kebijakan pemerintah, dan isu-isu penting lainnya dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui berbagai platform media sosial. Hal ini meningkatkan transparansi dan memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Menyatukan suara media sosial menyediakan wadah bagi masyarakat untuk terhubung, berdiskusi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai isu. Hal ini memungkinkan terbentuknya gerakan kolektif dan aksi nyata untuk mendorong perubahan positif. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah yaitu masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara langsung melalui media sosial dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakannya. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Memfasilitasi memobilisasi massa dalam aksi-aksi sosial dan politik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka. Media sosial membuka peluang baru bagi usaha kecil dan menengah untuk menjangkau pelanggan dan memasarkan produk mereka secara lebih luas. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif media sosial ancaman tersembunyi di balik layar meskipun menawarkan banyak manfaat, media sosial juga memiliki potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai, seperti penyebaran informasi salah dan hoaks. Informasi yang tidak terverifikasi dan menyesatkan dapat dengan mudah tersebar luas di media sosial, berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Cyberbullying dan ujaran kebencian. Media sosial dapat menjadi ruang bagi perilaku cyberbullying dan ujaran kebencian yang menargetkan individu atau kelompok tertentu, berakibat pada trauma psikologis dan perpecahan sosial. Kecanduan dan gangguan interaksi sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu kecanduan dan mengganggu interaksi sosial secara langsung, berakibat pada dampak negatif terhadap kesehatan mental dan hubungan interpersonal. Memaksimalkan Potensi Media Sosial menuju masyarakat yang lebih baik memahami dampak positif dan negatif media sosial merupakan langkah awal untuk



memaksimalkan potensinya dalam meningkatkan partisipasi publik dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif, bertujuan untuk membahas dan menganalisis literatur, yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan sesuai dengan hukum positif.¹ Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, peraturan perundang-undangan, serta konsep atau teori hukum. Pendekatan ini, yang juga disebut pendekatan kepustakaan, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis buku, peraturan, dan dokumen relevan. Dalam konteks kualitatif, penelitian ini fenomena yang terjadi diteliti, eksplorasi, mengapa dan apa yang terjadi.² Tujuan analisis data adalah untuk mengubah informasi mentah menjadi makna yang signifikan, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti dan merumuskan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan masalah hukum yang kompleks dengan dampak sosial dan kebijakan yang luas.

DISKUSI DAN HASIL

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi fenomena global yang tak bisa dihindari. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah mengubah cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Media sosial (medsos) juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.

Data terbaru menunjukkan bahwa WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan Facebook Messenger dan (X), Pinterest, Kuaishou, dan LinkedIn adalah platform media sosial yang paling populer di Indonesia.³ Dengan usia 16-64 tahun lebih dari 139 juta orang Indonesia aktif menggunakan media sosial, mencakup sekitar setengah dari populasi

¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 (1), 2020, hlm. 23.

² Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Humanika, Vol 21 (1), 2021, hlm. 35.

³ Cindy Mutiara Annur, Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024> diakses pada tanggal 07 Juli 2024.



nasional, ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di negara ini.⁴

Istilah yang sering muncul dalam medsos adalah netizen. Netizen, atau warganet dalam bahasa Indonesia, merujuk pada orang-orang yang aktif menggunakan internet, terutama pada platform sosial dan internet secara umum. Istilah ini merupakan gabungan dari kata "net" (jaringan) dan "citizen" (warga negara), yang secara harfiah berarti "warga internet". Netizen bukan hanya pengguna internet biasa, tetapi juga aktif dalam komunitas online, seperti forum diskusi, media sosial, dan platform lainnya. Mereka berinteraksi, bertukar informasi, dan bahkan menciptakan konten di dunia maya. Dalam perspektif harfiah netizen sama dengan warga internet.⁵

Ada beberapa alasan mengapa seseorang disebut netizen. Pertama, karena keaktifan yang terlibat aktif dalam berbagai aktivitas online, seperti browsing, chatting, berkomentar, dan membuat konten. Kedua, karena keterlibatan mereka dalam komunitas online yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Ketiga, netizen mempengaruhi satu sama lain dan dunia nyata melalui opini dan konten yang mereka bagikan. Keempat, netizen sering kali memiliki identitas online yang berbeda dengan identitas mereka di dunia nyata.

Peran netizen dalam masyarakat digital sangatlah penting. Mereka bisa menjadi sumber informasi, agen perubahan sosial, penjaga etika online, dan penghubung antar individu. Netizen berperan dalam membentuk budaya digital dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan melalui partisipasi aktif mereka di dunia maya.

Beberapa teori komunikasi dapat membantu kita memahami bagaimana media sosial dapat meningkatkan partisipasi publik. Salah satunya adalah teori agenda-setting, yang menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menetapkan agenda publik dengan menyoroti isu-isu tertentu. Dalam konteks media sosial, pengguna dapat memainkan peran dalam menetapkan agenda dengan menyebarkan informasi dan ide-ide

⁴ CNBC Indonesia, Raja Aplikasi Terbaru di RI, Ternyata Bukan WhatsApp-Instagram, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240226153650-37-517653/raja-aplikasi-terbaru-di-ri-ternyata-bukan-whatsapp-instagram> diakses pada tanggal 07 Juli 2024.

⁵ Ulfatun Hasanah dkk, Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial Instagram, Jurnal Onoma : Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Vol 2 (2), 2021, hlm. 413.



yang mereka anggap penting dan memonopolinya⁶. Teori agenda setting bertumpu pada dua asumsi dasar, yaitu menyaring dan membentuk apa yang kita lihat, tidak menyajikan begitu saja. Selanjutnya semakin besar media memberi perhatian masyarakat akan semakin menganggap itu penting.⁷

Sebagai contoh betapa dahsyat netizen menjadi garda terdepan pengungkapan kembali kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut merupakan sebuah insiden kriminal yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, pada 27 Agustus 2016. Korban dari pembunuhan ini adalah Vina dan Eki, yang ditemukan tewas di jembatan Talun, Cirebon. Peristiwa ini menjadi viral karena adanya dugaan manipulasi dalam penanganan kasus tersebut.

Reaksi masyarakat online terhadap kasus Vina Cirebon sangat bervariasi karena setiap hari media memberitakannya. Banyak spekulasi liar dan teori cocoklogi bermunculan. Analisis kasus ini dengan teori Mass Society menunjukkan bagaimana media massa mempengaruhi masyarakat modern, menggugah rasa takut, marah, dan simpati. Secara umum yang muncul di platform medsos adalah kemarahan pada aparat dan orang-orang yang dianggap tidak jujur dan simpati yang ditunjukkan kepada Pegi Setiawan kuli bangunan yang netizen yakini salah tangkap. Netizen membeberkan apa saja yang terkait kasus tersebut.

Teori Masyarakat Massa (Mass Society Theory) adalah sebuah teori sosiologis yang menguraikan karakteristik dan dampak masyarakat modern, yang ditandai oleh industrialisasi, urbanisasi, dan perkembangan media massa. Teori ini menyoroti hilangnya ikatan sosial tradisional, kemunculan individu-individu yang terisolasi, serta peran besar media massa dalam membentuk opini publik. Beberapa sosiolog terkemuka yang mempopulerkan teori ini antara lain Ferdinand Tönnies, yang membedakan antara *Gemeinschaft* (masyarakat tradisional dengan ikatan kuat) dan *Gesellschaft* (masyarakat modern dengan ikatan rasional). Emile Durkheim, yang menjelaskan solidaritas sosial dalam masyarakat modern melalui konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

Teori Masyarakat Massa berdampak signifikan pada pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengendalian media massa melalui regulasi konten dan kepemilikan media untuk

⁶ Lubis dkk, Literasi Komunikasi Warganet Generasi Milenial Di Media Sosial (Studi Kasus Warganet di Kota Mataram), *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol 4 (2), 2022, hlm. 59.

⁷ Erwan Efendi dkk, Teori Agenda Setting, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7 (1), 2023, hlm. 1717.



mencegah manipulasi dan kontrol sosial. Di bidang pendidikan, teori ini mendorong upaya peningkatan literasi media dan pemikiran kritis agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Namun saat yang sama media massa juga bisa dipergunakan untuk menghadapi pemerintah yang sedang berkuasa.⁸ Kebijakan sosial dirancang untuk membangun komunitas dan mengurangi isolasi sosial, sedangkan kebijakan ekonomi berusaha mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, teori ini juga menerima sejumlah kritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ini terlalu deterministik, menyederhanakan kompleksitas masyarakat, dan memberikan peran yang berlebihan kepada media massa. Kritik lain menyoroti kurangnya perhatian terhadap keragaman pengalaman dan identitas individu dalam masyarakat, serta kecenderungan teori ini untuk terlalu fokus pada dampak negatif media massa dan mengabaikan potensi positifnya. Meskipun demikian, Teori Masyarakat Massa tetap menjadi referensi penting untuk memahami karakteristik dan dampak masyarakat modern, serta menyediakan kerangka analisis untuk berbagai fenomena sosial seperti manipulasi media, alienasi, dan perubahan peran individu dalam masyarakat.

Teori lain yang relevan adalah yang menyatakan bahwa orang cenderung diam mengenai opini mereka jika merasa opini tersebut tidak populer. Media sosial dapat membantu mengatasi spiral of silence dengan menyediakan platform bagi orang untuk menyuarakan pendapat mereka, meskipun pendapat tersebut tidak populer.

Teori Spiral of Silence, dikembangkan oleh Elisabeth Noelle-Neumann pada tahun 1974, merupakan sebuah teori komunikasi yang menjelaskan proses terbentuknya dan pemeliharaan opini publik dalam masyarakat. Teori ini memeriksa bagaimana individu berperilaku dalam mengungkapkan pandangan mereka terhadap isu-isu yang kontroversial. Menurut teori ini, individu cenderung memilih untuk tidak berbicara atau menyembunyikan pandangan mereka jika mereka merasa pandangan tersebut tidak populer atau merupakan pandangan minoritas, karena takut akan mengalami isolasi sosial.

⁸ Toha Makhshun dan Khalilurrahman, Pengaruh Media Massa Dalam Kebijakan Pendidikan, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 1 (1), 2018, hlm. 65.



Inti dari Teori Spiral of Silence adalah bahwa orang cenderung lebih mungkin untuk mengungkapkan pandangan mereka jika mereka percaya bahwa pandangan tersebut didukung oleh mayoritas atau luas. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa pandangan mereka tidak populer atau berbeda dari mayoritas, mereka akan cenderung untuk tetap diam. Fenomena ini menciptakan pola spiral di mana pandangan mayoritas semakin dominan sementara pandangan minoritas cenderung terpinggirkan dan tidak didengar. Beberapa konsep kunci dalam Teori Spiral of Silence meliputi pertama, Fear of Isolation. Ketakutan individu akan diisolasi atau dianggap berbeda oleh kelompok sosial mereka, mendorong mereka untuk menyembunyikan pandangan yang kurang populer. Kedua, Quasi-Statistical Sense. Kemampuan individu untuk menilai distribusi opini di sekitar mereka melalui observasi sosial dan media massa, membantu mereka menentukan apakah pandangan mereka didukung oleh mayoritas atau minoritas. Ketiga, media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi tentang pandangan mayoritas dan minoritas. Media sering kali memperkuat pandangan yang dianggap populer sementara mengabaikan atau mengurangi pandangan yang kurang populer. Keempat, minoritas Vokal dan Mayoritas Diam. Dalam beberapa kasus, kelompok minoritas yang vokal dapat menciptakan kesan bahwa pandangan mereka lebih umum daripada yang sebenarnya, sementara mayoritas yang diam tidak menunjukkan pandangan mereka. Meskipun masyarakat kini semakin sadar bahwa banyak media saat ini tidak bersikap objektif, berbagai kepentingan yang didorong oleh motif bisnis, politik, dan ideologi telah mempengaruhi dan mengendalikan media.⁹

Teori ini memiliki implikasi yang signifikan dalam politik, media, dan komunikasi massa. Dalam konteks politik, Teori Spiral of Silence membantu menjelaskan mengapa opini publik dapat berubah setelah pemilihan umum atau referendum, di mana orang merasa lebih aman untuk mengungkapkan pandangan mereka setelah mengetahui dukungan sebenarnya. Dalam media, pentingnya representasi yang seimbang dari berbagai pandangan membantu mencegah dominasi pandangan tertentu dan memastikan bahwa suara minoritas juga didengar.

⁹ Yan Hendra, *Spiral Of Silence Theory Versus Perkembangan Masyarakat Sebuah Penjelasan dan Kritik Teori*, Jurnal Simbolika, Vol 5 (2), 2019, hlm. 115.



Secara keseluruhan, Teori Spiral of Silence memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana opini publik terbentuk dan dipertahankan, serta bagaimana faktor sosial dan psikologis mempengaruhi keberanian individu untuk mengungkapkan pandangan mereka dalam masyarakat.

Karena pentingnya teknologi dan jaringan maka sangat wajar jika pemerintah bisa memanfaatkan semaksimal mungkin perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dan jaringan memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Manfaat-manfaat ini termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, serta kualitas interaksi dan komunikasi.

Dalam hal efisiensi dan efektivitas, teknologi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas berulang dan manual seperti pengisian formulir, verifikasi data, dan penerbitan izin, yang menghemat waktu dan sumber daya serta meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan. Layanan online seperti e-government, e-learning, dan telemedicine memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah dengan mudah dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi kantor terkait. Data dan analitik dari teknologi juga membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur terkait kebijakan dan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang program, kebijakan, dan kinerja pemerintah melalui website, media sosial, dan aplikasi mobile. Teknologi juga memungkinkan pelaporan dan pemantauan kinerja program dan layanan pemerintah, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik dapat difasilitasi oleh teknologi. Dalam aspek kualitas interaksi dan komunikasi, teknologi memungkinkan pemerintah menyediakan layanan pelanggan yang lebih personal dan responsif melalui chatbot dan live chat. Pemerintah juga dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan lebih cepat dan efektif melalui media sosial dan aplikasi mobile, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai contoh penerapan teknologi dan jaringan di Indonesia, pelayanan KTP



elektronik telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Sebuah layanan berbasis database elektronik terpadu.

Namun semua itu bukan tanpa resiko, salah satunya jika ada hacker yang mengacak-acak sistem yang semua serba online. Seperti kejadian belum lama dimana hacker berhasil membobol sistem keamanan banyak lembaga pemerintahan. Belum lama ini, Pemerintah Indonesia mengonfirmasi hilangnya data dari 282 layanan kementerian/lembaga akibat serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional (PDN) hanya 44 lembaga yang memiliki cadangan data (backup), sehingga data yang hilang dari lembaga lainnya kemungkinan besar tidak bisa dipulihkan.¹⁰

Untuk memulihkan data, pemerintah memanfaatkan cadangan data yang ada di masing-masing kementerian/lembaga. Fokus utama diberikan pada layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat guna menjamin kelangsungan pelayanan yang optimal. Menurut laporan terbaru, serangan siber dampaknya juga data calon penerima KIP Kuliah, dengan sebanyak 800 ribu data calon penerima dilaporkan hilang.¹¹

Penggunaan data berbasis online, seperti penyimpanan cloud, melibatkan sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan dalam hal keamanan dan privasi. Salah satunya adalah kesalahan konfigurasi cloud yang dapat membuat sistem rentan terhadap peretasan, sering kali disebabkan oleh pengaturan keamanan standar, manajemen akses yang tidak tepat, dan kontrol akses data yang lemah. Selain itu, kredensial untuk akses cloud rentan diretas, meningkatkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan data yang tersimpan, walaupun penggunaan enkripsi data dapat memberikan lapisan perlindungan yang diperlukan. Penyimpanan cloud sebagai platform multi-pengguna juga membawa risiko kebocoran data oleh pihak ketiga atau serangan siber, sedangkan praktik BYOD dapat memperbesar potensi serangan malware yang mengancam keamanan data perusahaan. Ancaman seperti ransomware juga dapat mengincar penyimpanan cloud, mengakibatkan kerugian

¹⁰ Tria Sutrisna dan Ihsanuddin, Data di 282 Layanan Kementrian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up", Nasional Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/27/08173611/data-di-282-layanan-kementerian-lembaga-hilang-imbis-peretasan-pdn-hanya-44> diakses pada tanggal 07 Juli 2024.

¹¹ EMedia DPR RI, Server PDN Jebol: Data 800 Ribu Calon Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Hilang, <https://emedia.dpr.go.id/2024/06/30/server-pdn-jebol-data-800-ribu-calon-mahasiswa-penerima-kip-kuliah-hilang/> diakses pada tanggal 07 Juli 2024.



operasional dan finansial, sementara kehilangan kendali atas data dapat merusak reputasi bisnis dan kepercayaan pelanggan. Di samping itu, potensi gugatan hukum dapat muncul jika data pelanggan bocor dan disalahgunakan secara ilegal. Kehilangan data juga berpotensi merusak citra bisnis, mengurangi kredibilitas di mata mitra bisnis dan pelanggan, serta meningkatkan rentan terhadap ancaman eksternal seperti serangan siber yang dapat meretas akun penyimpanan cloud.

Netizen di media sosial menanggapi dengan kemarahan dan sindiran tajam setelah mengetahui bahwa Pusat Data Nasional (PDN) kehilangan data. Mereka secara terbuka menyalahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beserta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa mereka dianggap tidak kompeten dalam mengamankan sistem dari serangan siber. Banyak dari mereka menyerukan agar Budi Arie Setiadi mengundurkan diri, dengan petisi daring yang telah ditandatangani lebih dari 6.000 orang. Netizen mengejek kinerja Kemenkominfo yang dianggap berantakan dan tidak efektif dalam melindungi data nasional, serta meragukan kemampuan pemerintah untuk merespons ancaman hacker. Di platform media sosial, terdapat judul-judul seperti "PDN Tertimpa Ransomware, Menteri Kominfo Harus Mundur!" dan "Kinerja Kemenkominfo Kacau, Budi Arie Setiadi Harus Mengundurkan Diri!" yang mencerminkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menjaga keamanan data.

Memang media social bisa menjadi pisau bermata dua, bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Dampak positifnya antara lain terhadap partisipasi publik, termasuk meningkatkan akses informasi dengan memungkinkan masyarakat mengakses berbagai sumber informasi dengan mudah dan cepat. Meningkatkan partisipasi politik dengan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu, demonstrasi, dan petisi online. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memantau kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan mereka serta memfasilitasi mobilisasi massa untuk isu-isu penting seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Namun, media sosial juga memiliki beberapa dampak negatif terhadap partisipasi publik. Penyebaran informasi yang salah dan hoaks dapat menyesatkan masyarakat dan menghambat partisipasi publik yang konstruktif. Potensi cyberbullying dan ujaran



kebencian dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak kondusif untuk partisipasi publik. Selain itu, risiko kecanduan media sosial dapat mengganggu interaksi sosial langsung dan menghambat partisipasi publik dalam kehidupan nyata. Penggunaan medsos yang salah bisa beujung masuk bui, misalnya pencemaran nama baik melalui medsos, bisa dijerat pasal yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan digabungkan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.¹²

Pemerintah dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi publik di media sosial. Langkah-langkah tersebut termasuk meningkatkan literasi media masyarakat agar mereka dapat menavigasi informasi di media sosial dengan kritis dan bertanggung jawab. Membuat platform media sosial yang inklusif dan partisipatif yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Mendorong dialog dan diskusi yang konstruktif di media sosial tentang isu-isu penting yang dihadapi masyarakat. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang kebijakan dan program pemerintah. Menindak tegas penyebaran informasi yang salah dan hoaks di media sosial. Meningkatkan partisipasi publik di media sosial membutuhkan kerjasama multi-pihak, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan platform media sosial. Masyarakat sipil dapat berperan dalam meningkatkan literasi media, mendorong dialog dan diskusi yang konstruktif, dan memantau kinerja pemerintah di media sosial. Sektor swasta dapat berperan dalam mengembangkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan partisipasi publik di media sosial, seperti platform media sosial yang inklusif dan partisipatif serta alat-alat untuk mendeteksi informasi yang salah dan hoaks. Platform media sosial perlu bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan media sosial yang kondusif dan positif yang dapat mendorong partisipasi publik yang konstruktif.

Media sosial tidak hanya berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, namun juga bermanfaat dalam peningkaan ekonomi. Media sosial telah menjadi alat yang sangat penting dalam konteks ekonomi dengan menyediakan sejumlah manfaat yang mendukung

¹² Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 11 tentang ITE



baik individu maupun bisnis. Pertama, dalam bidang pemasaran dan promosi, media sosial memungkinkan untuk mencapai audiens yang luas di luar batas geografis konvensional, meningkatkan kesadaran merek, serta memfasilitasi iklan yang terarah dan promosi produk. Kedua, dalam hal penjualan dan layanan pelanggan, platform ini memungkinkan transaksi langsung serta interaksi yang efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, dalam konteks riset pasar dan pengembangan bisnis, media sosial memberikan pemahaman mendalam tentang tren konsumen dan mendukung pengumpulan data pasar yang efektif. Terakhir, dalam aspek jaringan dan kolaborasi, media sosial memungkinkan untuk membangun relasi dengan para influencer, membentuk kemitraan bisnis, dan melakukan perekrutan tenaga kerja. Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang efektif memerlukan strategi yang matang guna memaksimalkan potensi ekonomi dan meluaskan cakupan bisnis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan meningkatkan literasi digital artinya masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, kritis, dan bijak. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang seimbang untuk memerangi penyebaran informasi salah dan ujaran kebencian, serta melindungi privasi pengguna. Pemuda sebagai pengguna aktif media sosial perlu didorong untuk menjadi agen perubahan positif dan memanfaatkan platform ini untuk memajukan bangsa. Membangun kolaborasi multi-stakeholder yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform media sosial sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan media sosial yang kondusif dan positif. Kesimpulan Media sosial bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan segudang manfaat untuk meningkatkan partisipasi publik dan kemajuan bangsa. Di sisi lain, ia juga menyimpan potensi bahaya yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dan berkelanjutan dari semua pihak untuk memaksimalkan potensi positif media sosial dan meminimalisir dampak negatifnya, baik di bidang politik maupun ekonomi. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun masyarakat yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Selain itu pemerintah harus lebih meningkatkan kewaspadaan dari serangan hacker untuk melindungi data warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy, M. A. (2024, Maret 01). *Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024>
- CNBC. (2024, Februari 26). *Raja Aplikasi Terbaru di RI, Ternyata Bukan WhatsApp-Instagram*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240226153650-37-517653/raja-aplikasi-terbaru-di-ri-ternyata-bukan-whatsapp-instagram>
- EMedia, D. R. (2024, July 01). *Server PDN Jebol, Data 800 Ribu Calon Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Hilang*. Retrieved from EMedia DPR RI: <https://emedia.dpr.go.id/2024/06/30/server-pdn-jebol-data-800-ribu-calon-mahasiswa-penerima-kip-kuliah-hilang/>
- Erwan, E., & dkk. (2023). Teori Agenda Setting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1.
- Kornelius, B., & Muhamad, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Lubis, & dkk. (2022). Literasi Komunikasi Warganet Generasi Milenial Di Media Sosial (Studi Kasus Warganet di Kota Mataram). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 4, No.2.
- Muhammad, R. F. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*.
- Toha, M., & Khalilurrahman. (2018). Pengaruh Media Massa Dalam Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No 1.
- Tria, S., & Ihsanuddin. (2024, Juni 27). *Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN : Hanya 44 yang Punya "Back Up"*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/27/08173611/data-di-282-layanan-kementerian-lembaga-hilang-imbaspereetasan-pdn-hanya-44>
- Ulfatun, H., & dkk. (2021). Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial Instagram. *Jurnal Onoma : Pendidikan, Bahasa dan Sastra* , Vol 7 (2).



Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2024 tentang
perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Yan, H. (2019). Spiral of Silence Theory Versus Perkembangan Masyarakat Sebuah Penjelasan
dan Kritik Teori. *Jurnal Simbolika*, Vol 5, No 2.

UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang
ITE jo. UU No. 11 tentang ITE